

Media Sosial Sebagai Upaya Peningkatan Partisipatif Gen-Z Kota Kediri Dalam Pengawasan Pemilihan Umum 2024

Mochamad Taufiq Kolil, Dina Favliana Safi'i, Zulfa Arum Lestari, Rizki Amalia Luthanza, Ahmad Khafid Azizi, Afrila Hasan Al Hakim, Galih Arifi.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Jl. Sunan Ampel No.7 Ngronggo Kediri

taufiq.azmi007@gmail.com, dinafavliana14@gmail.com, zulfaar1208@gmail.com,
amaliaaluthanza@gmail.com, khafid.azizi@gmail.com, afrilahasan123@gmail.com,
galihfardian16@gmail.com

Abstract

This article discusses efforts to increase the participation of Gen-Z in monitoring the 2024 elections by the Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) of Kediri City through social media. The research aims to identify the efforts made by Bawaslu Kediri to encourage active participation of Gen-Z in election monitoring and to understand the potential for fraud. The research method used is descriptive qualitative. Sources include interviews, books, journals, and educational content on Bawaslu Kediri's social media. The results of the study show that Gen-Z has significant potential in elections, as they dominate the population in Kediri City. Bawaslu Kediri enhances participatory monitoring by capitalizing on this fact, creating engaging educational content that captures the attention of Gen-Z. Additionally, Bawaslu Kediri conducts outreach to first-time voters to provide them with accurate and valid information.

Keyword: Elections, Gen-Z, Participatory Monitoring.

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang upaya meningkatkan partisipasi Gen-Z dalam pengawasan pemilu 2024 oleh Bawaslu Kota Kediri melalui media sosial. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan Bawaslu Kota Kediri dalam mewujudkan Gen-Z yang aktif dalam mengawasi pemilu dan mengetahui potensi kecurangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Sumber yang dipakai adalah wawancara, buku, jurnal, dan konten edukasi di media sosial Bawaslu Kota Kediri. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Gen-Z memiliki potensi yang besar dalam pemilu karena di Kota Kediri didominasi oleh generasi ini. Bawaslu Kota Kediri meningkatkan pengawasan partisipatif dengan memanfaatkan fakta ini yaitu membuat konten-konten edukasi yang menarik perhatian Gen-Z. Selain itu, Bawaslu Kota Kediri juga melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula agar mereka mendapat informasi yang benar dan valid.

Kata kunci: Pemilu, Gen-Z, Pengawasan Partisipatif.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, maka adanya pemilu merupakan hal yang pasti akan terjadi. Menurut Henry B. Mayo Demokrasi merupakan sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik .

Pemilihan umum atau Pemilu merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan demokrasi sebuah negara. Sistem pergantian kekuasaan di Indonesia diadakan secara periodik yaitu lima tahun melalui kegiatan pemilu. Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Sistem ini menjadi pilihan paling populer yang digunakan negara-negara di dunia .

Dalam sistem negara demokrasi, pemilihan umum yang selanjutnya disingkat Pemilu merupakan salah satu indikator dan tolak ukur penting pelaksanaan. Diselenggarakannya pemilu di Indonesia ialah guna memilih anggota Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, ataupun Pemimpin kepala daerah, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati serta Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota.

Hampir semua negara di dunia melaksanakan kegiatan Pemilu sebagai media untuk memberikan kesempatan pada masyarakat dan elite kekuasaan melakukan sirkulasi dan rekrutmen untuk berbagai jabatan kekuasaan politik dan pemerintahan baik di lembaga legislatif.

Di Indonesia, Pemilu diadakan secara berkala dan menjadi salah satu tonggak utama dalam menentukan arah kebijakan negara. Untuk memastikan bahwa Pemilu berjalan secara adil dan transparan, pengawasan pemilu oleh masyarakat sangat diperlukan. Salah satu kelompok yang memiliki peran krusial dalam pengawasan pemilu adalah Generasi Z yang sering disebut sebagai Gen-Z.

Gen-Z adalah generasi yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga pertengahan 2010-an. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah penduduk Gen-Z di Indonesia adalah sekitar 60 juta orang. Mereka adalah generasi yang tumbuh dalam era di mana teknologi informasi dan media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Media sosial, seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan platform lainnya, telah menjadi alat yang efektif untuk berbagi informasi, memobilisasi dukungan, dan menyampaikan pesan politik.

Di Kota Kediri, generasi ini memiliki potensi besar untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya Pemilu 2024. Penduduk Kota Kediri tahun 2020 paling banyak adalah

Gen-Z sebesar 79.164 orang atau 27,79 persen dari total penduduk Kota Kediri. Jumlah yang sangat besar ini tentu memiliki pengaruh dalam pembentukan suara pemilu. Mereka dapat memberikan bantuan dalam pengawasan pemilu melalui media sosial agar jika terjadi kecurangan atau masalah dapat segera diatasi oleh badan yang berhak yaitu Bawaslu.

Bawaslu Kota Kediri adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Kediri. Bawaslu Kota Kediri memiliki portal resmi di <https://kedirikota.bawaslu.go.id> yang menyediakan informasi tentang kegiatan dan profil anggota Bawaslu Kota Kediri. Saat ini Bawaslu Kota Kediri diketuai oleh Yudi Agung Nugraha dan Kepala Sekretariat dijabat oleh Fenita Putri Cahyantari. Bawaslu Kota Kediri ikut dalam menyukseskan pemilu dengan mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan potensi pelanggaran melalui sosial media.

Media sosial sebagai salah satu produk kemajuan teknologi telah membawa revolusi besar dalam cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia di sekitar. Kehadiran platform-platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan berbagai aplikasi lainnya telah mengubah cara komunikasi secara mendasar. Namun, salah satu dampak yang paling signifikan adalah

peran media sosial dalam mempengaruhi masyarakat, terutama dalam konteks komunikasi politik.

Dalam konteks komunikasi politik, media sosial telah menjadi alat penting bagi kandidat politik dan partai politik untuk berkomunikasi dengan pemilih. Siapapun dapat menggunakan platform ini untuk menyampaikan pesan kampanye, berinteraksi dengan pemilih, dan memobilisasi dukungan. Media sosial juga memungkinkan pemilih untuk berpartisipasi dalam diskusi politik, mengorganisir kampanye, dan menyuarakan pandangan mereka secara lebih luas.

Media sosial telah menjadi salah satu alat paling efektif bagi partai politik untuk mencapai pemilih, terutama Gen-Z yang secara signifikan mengandalkan platform ini sebagai sumber informasi utama. Dengan teknologi yang semakin canggih, partai politik dapat merancang kampanye sesuai dengan preferensi para pemilih muda. Mereka dapat menyampaikan pesan-pesan kampanye, menginformasikan pemilih tentang visi dan program partai, serta menjelaskan pentingnya pemilu dengan cara yang lebih mudah dicerna oleh Gen-Z.

Penting untuk dicatat bahwa penggunaan media sosial oleh partai politik juga membawa tanggung jawab besar. Mereka harus memastikan bahwa informasi yang mereka bagikan adalah akurat dan tidak menyesatkan.

Selain itu, mereka harus berkomunikasi dengan etika dan menghindari retorika yang memicu polarisasi dan konflik.

Saat ini menggunakan media sosial begitu mudah diakses sehingga banyak informasi yang sengaja dibuat untuk melakukan pelanggaran, kecurangan, dan menyebarkan berita tidak benar yang dilakukan oleh oknum. Sehingga masyarakat terutama Gen-Z haruslah teliti dan cermat terhadap semua informasi yang ada di sosial media sebelum mempercayainya.

Melalui pendahuluan ini akan mengeksplorasi bagaimana memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi Gen-Z di Kota Kediri dalam pengawasan Pemilu 2024 oleh Bawaslu Kota Kediri. Artikel ini juga akan membahas potensi dan tantangan yang Gen-Z hadapi. Dengan pemanfaatan media sosial yang cerdas dan berpengaruh, Gen-Z Kota Kediri dapat berperan penting dalam memastikan Pemilu 2024 berlangsung dengan adil, bebas dari penipuan, dan sesuai dengan keinginan rakyat.

2. Metode

Kajian dengan judul Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Alat Peningkatan Partisipasi Gen-Z Kota Kediri dalam Pengawasan Pemilu 2024 memerlukan pemahaman mengenai ruang lingkup dalam proses pengawasan partisipatif. Sehingga penelitian kualitatif

deskriptif dinilai sangat tepat untuk penelitian dengan judul ini. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan partisipasi Gen-Z dalam pengawasan Pemilu 2024 mendatang dan memahami upaya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Kediri untuk menjaga demokrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Ika selaku staff Bawaslu Kota Kediri, serta sumber data sekunder yang didapatkan dari beberapa buku terkait tentang partisipasi pengawasan pemilu, postingan sosial media Bawaslu Kota Kediri. Terdapat empat tahapan dalam analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan, reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan data.

3. Hasil dan Pembahasan

Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Pemilih Pemula melalui Media Sosial

Dengan adanya pemilih yang mampu dan memiliki kesadaran penuh serta pengetahuan dengan ketertiban pemilu, menjadi syarat mutlak dari terciptanya Pemilihan Umum yang berjalan sesuai aturan. Sebab itulah proses pemilu memerlukan tanggapan yang kritis dari masyarakat, khususnya pemilih.

Berbagai faktor dari kesiapan calon pemilih dapat menentukan kesadaran dalam menggunakan hak pilih. Mulai dari faktor internal, faktor yang dipengaruhi oleh diri calon pemilih tersebut. Masalah yang dihadapi antara lain: Pemilih mungkin merasa bingung atau tidak yakin tentang proses pemilihan, kurangnya pendidikan politik tentang isu-isu politik, pemilih belum menentukan arah politik yang mereka anut, pemilih merasa bahwa satu suara mereka tidak akan membuat perbedaan. Rasa tidak berdaya ini bisa mengurangi motivasi untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan. Kurangnya keterlibatan politik sejak dini.

Sedangkan, faktor eksternal yang berasal dari lingkungan atau konteks sosial dan melibatkan aspek-aspek: pendidikan politik yang didapatkan oleh pemilih dalam proses pemilihan dan partisipasi politik, pengaruh dari keluarga atau teman memiliki peran penting dalam membentuk pandangan politik

calon pemilih, kampanye pemilihan dari partai politik juga mempengaruhi persepsi dan kesiapan pada pemilih pemula. Kampanye harus meningkatkan dari segi informatif dan inspiratif yang dapat meningkatkan partisipasi dan kepercayaan pemilih pemula dalam proses pemilihan.

Pada era ini, meluasnya pemanfaatan dari media sosial memiliki feedback positif pada kehidupan bermasyarakat. Pemanfaatan media sosial meliputi berbagai kemudahan dalam berkomunikasi, tempat tukar pikiran, atau menambah relasi dari aplikasi media sosial tersebut. Pemanfaatan media sosial ini juga dapat bermanfaat bagi forum-forum politik dalam penyebaran informasi yang berkaitan dengan Pemilihan Umum pada tahun 2024.

Menurut data dari Bawaslu Kota Kediri melalui wawancara oleh salah satu staff, Ika Durrotus, penggunaan media sosial sangat dinilai efektif bagi pelapor untuk melaporkan tindakan kecurangan yang menyalahi aturan Pemilihan Umum. Kecurangan yang paling sering terjadi terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat ibadah atau fasilitas umum. Menurut Ika “Pelanggarannya sih paling sering yang diadakan terkait pemasangan alat peraga kampanye itu, karena dipasang di tempat ibadah atau fasilitas umum. Kan jadi ganggu ya kalau gitu,”

Pemanfaatan sosial media juga dilakukan oleh Bawaslu Kota Kediri dalam memberikan

edukasi kepada masyarakat dan juga partai politik tentang pengawasan pemilihan umum. Bawaslu Kota Kediri menggunakan beberapa media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan juga Website resmi.

Gambar 1. Rapat koordinasi optimalisasi media sosial panwascam pada pemilu 2024



Instagram dari Bawaslu Kota Kediri @bawaslu_kotakediri telah aktif selama 6 tahun yang dimulai sejak tahun 2017. Akun tersebut aktif mengunggah kegiatan-kegiatan Bawaslu Kota Kediri. Terhitung Desember 2023 akun Instagram yang mempunyai 1.791 followers dan mengikuti 295 akun, serta telah melakukan postingan sebanyak 1.313 postingan. Pada beberapa postingan Instagram Bawaslu Kota Kediri merupakan postingan yang berisi edukasi tentang pemanfaatan dari media sosial yang dapat dilihat oleh publik.

Gambar 2. Konten edukasi tentang potensi pelanggaran kampanye



Gambar di atas merupakan salah satu postingan dari Instagram Bawaslu Kota Kediri yang membahas tentang apa saja potensi pelanggaran pada kampanye. Postingan tersebut telah mencapai 600 kali diputar per Desember 2023.

Selain dari akun Instagram, Bawaslu Kota Kediri juga aktif dalam media sosial Facebook dan Website.

Gambar 3. Postingan Facebook Bawaslu Kota Kediri tentang sosialisasi peran media pengawasan pada pemilu 2024



Dalam unggahan Facebook di atas menampilkan kegiatan dari Bawaslu Kota Kediri yang mengusung tema “Peran Media Dalam Pengawasan Pemilu 2024” acara

tersebut dihadiri oleh beberapa perwakilan dari organisasi dan awak media dari Kota Kediri

Gambar 4. Publikasi berita pada website resmi Bawaslu Kota Kediri tentang Pengoptimalan Media Sosial

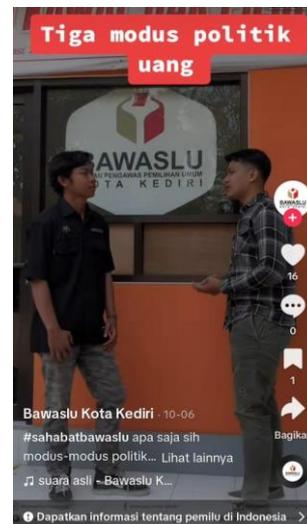


Tidak jauh beda dari platform media sosial Bawaslu Kota Kediri di atas, website resmi dari Bawaslu ini juga tetap aktif dan rutin untuk mengunggah kegiatan-kegiatan dari Bawaslu Kota Kediri. Pada unggahan tersebut Bawaslu Kota Kediri mengajak jajaran Panwascam guna pengoptimalkan media sosial pemilu 2024.

Gambar 5. Konten edukasi tentang larangan pose foto oleh aparat sipil negara.



Gambar 6. Konten edukasi tentang tiga modus politik uang



Dalam memaksimalkan manfaat media sosial. Bawaslu Kota Kediri juga aktif dalam penggunaan akun Tiktok. Seperti yang kita tahu Tiktok merupakan akun sosial media yang sedang hype di kalangan anak muda. Unggahan dari Bawaslu tersebut mengedukasi calon pemilih agar tidak melakukan hal-hal yang menjadi pelanggaran dari Pemilihan Umum.

Pemanfaatan dari akun media sosial Bawaslu Kota Kediri telah dinilai sangat aktif dalam memberikan edukasi tentang Pemilu pada masyarakat khususnya calon pemilih baru. Konten-konten yang mudah ditemukan dan dipahami menjadi salah satu faktor dari meningkatnya kepercayaan Gen-Z sebagai partisipatif dalam Pemilihan Umum 2024.

Namun, terdapat beberapa hal yang masih dalam tahap penyempurnaan dalam akun

media sosial Bawaslu Kota Kediri yaitu ; Promosi akun media sosial, promosi efektif yang dapat dilakukan secara langsung adalah pada saat kegiatan sosialisasi. Anggota Bawaslu dapat mempromosikan akun media sosial mereka pada audience ketika ujung acara sosialisasi.

Potensi dan Tantangan yang dihadapi Gen-Z sebagai partisipasi pengawasan pemilu

Zaman sekarang adalah di mana banyak hal yang serba digital dan terus mengalami perkembangan. Gen-Z yang hidup dalam zaman ini tentu mendapat dampak yang signifikan akan adanya teknologi. Gen-Z memegang peranan penting dalam merintis transformasi dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek yang memiliki potensi besar untuk dimasuki Gen-Z adalah dunia politik. Generasi ini dapat ikut dalam kegiatan nyata yaitu pengawasan terhadap pemilu.

Sebagai Generasi yang terus-menerus bersinggungan dengan teknologi dan terhubung melalui media sosial, tentu Gen-Z memiliki potensi yang besar dalam mengupayakan dan memperkuat proses demokrasi melalui pengawasan pemilu yang proaktif. Pengawasan dapat dilakukan melalui media sosial karena partai politik juga berkampanye di media sosial. Hal ini membuat Gen-Z dapat terus memantau dan berinteraksi secara intensif terhadap informasi atau isu

yang beredar.

Meski demikian, sementara mereka menghadapi peluang besar, generasi ini juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan peran mereka dalam memastikan integritas dan transparansi pemilihan.

1. Potensi Gen-Z dalam Pengawasan Pemilu

- **Teknologi dan Keterampilan Digital.** Gen-Z tumbuh dengan teknologi digital, sehingga mereka memiliki keterampilan teknologi yang kuat. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk dengan cepat menyebarkan informasi, mendeteksi pelanggaran, dan berpartisipasi dalam pengawasan pemilu secara daring.
- **Aktivisme Sosial.** Gen-Z cenderung terlibat dalam aktivisme sosial dan bersemangat untuk menyuarakan keadilan. Hal ini membuat mereka memiliki potensi besar untuk terlibat dalam pengawasan pemilu dan mengkritisi ketidakadilan atau pelanggaran yang mungkin terjadi.
- **Kesadaran akan Isu-Isu Politik.** Banyak dari Gen-Z yang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap isu-isu sosial dan politik. Mereka dapat menjadi pengawas yang efektif karena pemahaman mendalam mereka tentang berbagai isu yang relevan.

- Kemampuan untuk Menganalisis Informasi. Gen-Z dikenal karena kemampuan mereka untuk menganalisis informasi dengan kritis. Kemampuan ini sangat diperlukan dalam mendeteksi dan memahami konteks pelanggaran pemilu.
- Keterlibatan dalam Diskusi Publik. Gen-Z aktif dalam berpartisipasi dalam diskusi dan membagikan pandangan mereka di platform media sosial. Hal ini memungkinkan mereka untuk dengan cepat menyebarkan informasi terkait pelanggaran pemilu dan memobilisasi dukungan .

2. Tantangan Gen-Z dalam Pengawasan Pemilu

- Penyebaran Informasi Palsu. Gen-Z dapat menjadi sasaran penyebaran informasi palsu atau propaganda politik. Mereka perlu hati-hati dalam memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya agar tidak ikut menyebarkan disinformasi.
- Tekanan Teman dan Keluarga. Tekanan dari teman atau keluarga untuk mendukung pilihan politik tertentu dapat menjadi hambatan. Gen-Z mungkin perlu mengatasi tekanan sosial untuk tetap objektif dan independen.
- Kurangnya Akses Pendidikan Politik.

Meskipun literasi digital tinggi, kurangnya pendidikan politik formal dapat menjadi tantangan. Gen-Z perlu lebih banyak akses ke pendidikan politik untuk memahami lebih baik proses pemilu .

Mengatasi tantangan ini memerlukan upaya untuk meningkatkan literasi politik, memberikan sumber daya yang diperlukan, dan memotivasi Gen-Z untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan pemilu guna memastikan integritas proses demokratis.

4. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Gen-Z memiliki potensi luar biasa untuk menjadi kekuatan yang dinamis dalam pengawasan pemilu. Keterampilan teknologi yang kuat, kesadaran akan isu-isu sosial dan politik, serta kemampuan untuk menganalisis informasi membuat mereka menjadi agen perubahan yang berharga dalam memastikan keberlangsungan demokrasi. Dengan aktif terlibat dalam mendeteksi pelanggaran dan memobilisasi dukungan melalui platform digital, Gen-Z dapat membawa dampak positif terhadap integritas proses pemilu.

Fakta ini dimanfaatkan oleh Bawaslu Kota Kediri untuk mengajak para Gen-Z di Kota Kediri agar secara aktif dapat ikut serta dalam pengawasan pemilu 2024. Upaya yang

dilakukan Bawaslu Kota Kediri adalah sosialisasi kepada para pemilih pemula dan membuat konten edukasi di media sosial. Tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan wawasan juga informasi yang valid dan kredibel.

Namun demikian, tantangan juga hadir di sepanjang jalan. Dari penyebaran informasi palsu hingga tekanan sosial, Gen-Z dihadapkan pada berbagai hambatan yang memerlukan kesadaran diri dan ketangguhan. Untuk mengoptimalkan peran mereka, perlu ada upaya bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan.

Dengan demikian, sambil memahami potensi dan tantangan, penting bagi kita untuk mendorong dan memfasilitasi keterlibatan aktif Gen-Z dalam pengawasan pemilu. Hanya dengan kolaborasi dan dukungan yang kokoh, kita dapat memastikan bahwa generasi ini tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga agen yang membangun masa depan demokrasi yang lebih kuat dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnira, E. (2023). Optimalisasi Media Sosial sebagai Sarana Publikasi Pengawasan Pemilu 2024: Kasus Bawaslu Kota Tanjungpinang. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 3(1).
- Jagad Aditya Dewantara, & T Heru Nurgiansah. (2021). Strengthening Pancasila Values During the Covid-19 Pandemic. *Edukatif*, 3(4), 2411–2417.
- Kusuma, Winanda, Bunga Permatasari, and Reza Adriantika Suntara. 2022. “Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desadalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum” *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora* 2(2): 93-104
- Latifah, N. L. D. (2020). MODEL PENGAWASAN PARTISIPATIF BAWASLU DIY PADA PEMILU SERENTAK 2019 (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Lestari, E. Y., & Arumsari, N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan walikota semarang di kota semarang. *Integralistik*, 29(1), 10.
- Ratnamulyani, I. A., & Maksudi, B. I. (2018). Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor.

Sosiohumaniora, 20(2), 154-161.

Saputra, I., & Firdaus, F. (2023). Penguatan Nasionalisme Millennial Dalam Politik: Studi Kasus Kader Sekolah Penggerak Partisipatif Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora*, 2(2), 129-136.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet

Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14-28.

Yusrin, Y., & Salpina, S. (2023). Partisipasi Generasi Millennial dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024. *Journal on Education*, 5(3), 9646-9653.